

MUTU PESANTREN SALAFIYAH DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

Khoirul Anam

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
chasna.choir@gmail.com

ABSTRACT

Islamic boarding school contribute significantly to the establishment of national education specifically in the following matters, namely, (1) internalization of norm, (2) wisdom, (3) good behavior/*akhlaq al karimah*, (4) good morality. In other words, Islamic boarding school affects the way of life in Indonesia. In the context of improving the quality and access toward education, the role of Islamic boarding school must be elevated so that it can develop well as to respond the global era. This is so doing for a purpose of improving the quality of human resource in Indonesia.

Kata Kunci: Mutu, Pesantren Salafiyah, Pendidikan Nasional

Pendahuluan

Pondok pesantren selama ini telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat yang menjadi pendukungnya¹. Pesantren, sebagaimana diketahui merupakan pranata (pendidikan) tradisional dan sebagaimana pranata tradisional lainnya, pesantren sempat dicurigai sebagai sarang *kejumudan* dan konservatisme, sehingga dianggap sebagai penghalang bagi kelangsungan proses pembangunan. Secara historis, pesantren dapat diartikan sebagai penerusan sistem pendidikan pra-Islam di negeri ini, yang oleh sementara kalangan diidentifikasi sebagai *sistem mandala*². Ia telah dipercaya sebagian besar masyarakat santri sebagai lembaga pemberdayaan diri dan penyadaran. Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier³, bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang, dan keagungan duniawi, tetapi pesantren menanamkan kepada para santri bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.

Pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan yang bercorak tradisional, unik dan

¹Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hal. xi

²*ibid.*, hal. 91

³Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES, 1981), hal.

*indegenuous*⁴. Menurut Endang Soetari, pesantren dipandang sebagai solusi yang tepat untuk menjawab tantangan dunia pendidikan masa depan⁵. Hal ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa kerangka acuan yang dikumandangkan akhir-akhir ini, seperti *community Base Education*, *Shool Base Management*, (meskipun tidak sistematis di pendidikan formal) sudah lama diterapkan di dunia pesantren. Namun menurut sebagian pakar, kemandirian yang selama ini dijalankan pesantren belum dioptimalkan, terutama dalam upaya mencari terobosan-terobosan yang berarti.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren merupakan lembaga pengajaran asli yang paling besar dan mengakar kuat di negeri ini.⁶ Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, merupakan sistem pendidikan nasional yang telah lama hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia tersebar luas di seluruh tanah air, terutama di pedesaan. Ia telah eksis di tengah masyarakat selama kurang lebih enam abad (mulai abad ke-15 sampai sekarang) dengan salah satu cita-citanya yaitu latihan untuk dapat berdiri sendiri dan membina agar tidak menggantungkan sesuatu kepada selain Tuhan⁷. Ki Hajar Dewantoro pernah mencita-citakan pesantren menjadi sebuah sistem pendidikan Indonesia dengan alasan bahwa selain pesantren sudah lama melekat dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, model ini (pesantren) juga merupakan kreasi kebudayaan bangsa Indonesia setidaknya Jawa.⁸ Pesantren sebagai institusi sosial tidak hanya berbentuk lembaga –dengan seperangkat elemen pendukungnya seperti masjid, asrama/pondokan, ruang mengaji, kiai, dan beberapa *ustadz*– tetapi pesantren juga merupakan entitas budaya yang mempunyai implikasi terhadap kehidupan sosial di sekitarnya⁹.

Melalui perjalanan panjang, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam banyak mengalami dinamika, yang dipelopori oleh para da'i yang menyebarkan agama Islam pada saat ini (para wali), terutama di pulau Jawa yang dikenal dengan nama *wali sanga* (sembilan). Perjuangan para wali inilah yang mengilhami para penyebar Islam pada periode-periode selanjutnya. Namun dalam perjalanan pesantren yang begitu panjang, di kalangan pesantren telah banyak mengalami asimilasi dan

⁴Mastuki dan Abd. Adhim, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dirjend Bagais Depag RI, 2004), hal. 19

⁵Endang Soetari, *Pesantren, Solusi Pendidikan Masa Depan*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0902/06/0414.htm>, diakses 8 Desember 2005

⁶Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 87

⁷Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Para Kyai*, cetakan ke-4 (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 21

⁸*Ibid*, hal. 55

⁹Hamdan Farchan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 1

adaptasi kultural. Hal ini dilakukan dalam rangka usaha agar pesantren bisa tetap hidup lama (*survive*) dengan melakukan akulturasi budaya maupun tata nilai yang dirasa kurang sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah banyak memberikan andil besar dalam mencerdaskan pendidikan bangsa khususnya di masyarakat Jawa dan Madura. Di Jawa dan Madura, pesantren pernah menduduki posisi strategis di berbagai lapisan masyarakat¹⁰. Pesantren saat itu mendapat pengaruh dan penghargaan besar yang mampu mempengaruhi seluruh elemen kehidupan masyarakat¹¹. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsa Indonesia, di mana darinya bermunculan para ilmuwan, politikus serta cendekiawan yang memasuki kancah percaturan di segala bidang sesuai disiplin ilmunya, baik dalam taraf lokal, regional, nasional, maupun internasional¹². Pesantren juga pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*culture literacy*)¹³. Pesantren merupakan lembaga yang mampu melahirkan jutaan ulama dan kyai, yang akan meneruskan perjuangan untuk mengeluarkan masyarakat dari kebodohan, dengan niat baik dan ikhlas karena Allah SWT.

Keberadaan pesantren di tengah-tengah masyarakat Indonesia selama berabad-abad sampai sekarang membuktikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendidikan agama yang diberikan di sana. Apalagi kalau diingat bahwa pesantren-pesantren yang bertebaran di seluruh Indonesia semua atau hampir semua merupakan milik kyai dan rakyat Indonesia sendiri, dan bukan kepunyaan pemerintah. Semuanya dapat hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia¹⁴.

Pesantren pada masa sekarang tidak *sekaku* pada periode awalnya. Banyak pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan barat dari sisi metodologi, manajemen, kurikulum dan lainnya. Sebuah kenyataan yang harus diakui bahwa selamanya pesantren tidak akan mampu melahirkan teknokrat-profesional yang dibutuhkan oleh dunia kerja, ketika pesantren

¹⁰Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 12

¹¹Hal ini membuktikan kebutuhan masyarakat Indonesia akan pendidikan yang ada di pesantren, sehingga jelas vitalitas hidup pesantren berakar pada keinginan, keperluan, dan kemampuan masyarakat.

¹²M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 84

¹³Mujamil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. xiii

¹⁴M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2003), hal. 93

tersebut tidak mau beradaptasi dengan perubahan paradigma pendidikan yang sesuai.

Sebagai lembaga pendidikan Islam¹⁵, pesantren pada era sekarang dihadapkan pada derasnya arus perubahan sosial sebagai dampak dari modernisasi-industrialisasi seperti sekarang ini. Apalagi di tengah persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini –masalah narkoba, dekadensi moral, kemiskinan, gizi buruk– memerlukan langkah kongkrit pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan. Kedepan bagaimana pesantren dapat eksis sebagai pintu perbaikan moral bangsa dalam melaksanakan pembangunan demi mencapai cita-cita yang diinginkan.

Dan yang lebih menggembirakan lagi bahwa perkembangan pesantren pada akhir abad ke-20 adalah munculnya beberapa pesantren yang dengan sengaja didirikan sebagai upaya merespon tuntutan perubahan masyarakat global¹⁶. Langkah ini kemudian diikuti beberapa pesantren yang telah eksis terlebih dahulu dengan merespon terhadap situasi dan kondisi masyarakat secara seimbang, serta membuka diri dalam merespon perubahan dengan meningkatkan manajemen pengelolannya, walaupun perubahan itu sedikit banyak akan mengurangi nilai-nilai kharismatik, kewibawaan atau barangkali keikhlasan.

Dalam rangka meningkatkan kualitasnya, pesantren harus bersikap adaptif dan adoptif terhadap sistem baru seperti madrasah atau sekolah, demikian pula bersedia untuk selalu menyempurnakan kurikulum yang dipakai yang disesuaikan dengan tuntutan jaman, serta menyesuaikan pola kepemimpinan pesantren yang lebih demokratis. Dengan pengelolaan yang baik, stikma yang sampai saat ini masih menempel pada pesantren, seperti lingkungan kumuh akan bisa dihapus atau paling tidak dikurangi.

Sudah saatnya manajemen pesantren ditangani secara profesional sesuai prinsip manajemen yang benar. Hal ini menjadi sebuah keniscayaan, apalagi ketika saat ini peluang ke arah itu sudah terbuka lebar dengan diposisikannya pesantren secara implisit sebagai bagian dari

¹⁵Muhaimin mengelompokkan pendidikan Islam ditinjau dari aspek program dan praktik penyelenggaraannya menjadi lima jenis, yaitu (1) pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah yang menurut UU No, 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas disebut sebagai pendidikan keagamaan; (2) pendidikan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama; (3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam seperti SD Islam, SMP Islam dsb.; (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di sekolah sebagai mata pelajaran; dan (5) pendidikan Islam dalam keluarga atau majlis-majlis ta'lim. Lihat Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, (JakartaL: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 9-10

¹⁶Munir, "Eksistensi dan Degradasi Lembaga Pendidikan Islam", dalam Toto Suharto et.al. (eds.), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005), hal. 73

lembaga pendidikan nonformal yang sejajar dengan lembaga pendidikan formal lain seperti yang tercantum dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 26 ayat 6 yang menyebutkan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemda dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.¹⁷ Banyak lulusan pondok pesantren –yang sudah terakreditasi– bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meski masih terbatas pada jurusan tertentu.

Melihat fenomena ini, pesantren mau tidak mau harus menentukan sikap agar eksistensi dan fungsinya tetap bisa dirasakan oleh masyarakat. Usaha apakah yang harus ditempuh oleh pesantren agar tetap *survive*? Jawaban ini akan dapat ditemukan bila seseorang tahu persis akan kondisi pesantren. Namun usaha ini akan meniscayakan penelanjangan yang jujur dan rela melepaskan diri dari asumsi negatif dan sikap apriori terhadap pesantren.

Mutu Pendidikan

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Mutu dalam Pendidikan

Bagi setiap institusi, mutu merupakan agenda utama, dan meningkatkan mutu adalah tugas yang sangat penting. Namun demikian, sebagian orang menganggap mutu sebagai konsep yang penuh teka-teki. Mutu dipahami sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit diukur. Dalam pandangan orang yang satu, terkadang mutu dipahami berbeda dengan yang lain. Sehingga sangat wajar ketika dua orang pakar mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana menciptakan sebuah institusi yang baik.

Petualangan mencari mutu bukan sebuah ekspedisi yang baru. Dalam dunia industri, sejak dulu selalu ada keharusan untuk merasa yakin bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi agar bisa memberikan kepuasan pada pelanggan yang akhirnya juga akan mendatangkan keuntungan¹⁸.

Gagasan tentang perbaikan mutu mulai digulirkan setelah perang dunia kedua. Kenditipun demikian, perusahaan Inggris dan Amerika mulai tertarik masalah mutu sekitar tahun 1980-an¹⁹ saat mereka bertanya-tanya mengenai keunggulan Jepang merebut pasar dunia. Meskipun isu mutu terlambat masuk Barat, tetapi gagasan mutu sudah dikembangkan tahun 1930-an dan 1940-an oleh Dr. W. Edward Deming, seorang ahli fisika dan matematika dan diakui sebagai “Bapak Mutu”

¹⁷*Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 18 ; lihat juga pasal 55 ayat 1, hal. 36

¹⁸Edward Sallis, *Total quality Management ini Education*, Ahmad Ali Riyadi et.al. (terj.), (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), hal. 34

¹⁹*ibid.* hal. 36

yang memperoleh gelar Ph.D. di Universitas Yale²⁰. Yang menarik dari aktifitas Deming, bahwa pengaruhnya sebagai teoritikus manajemen bermula di Barat, namun justru Jepang memanfaatkan keahliannya sejak tahun 1950.

Deming awalnya berkenalan dengan manajemen tradisional pada akhir tahun 1920-an, saat ia bekerja di Western electric. Pengalaman ini membawanya pada pertanyaan “Bagaimana cara terbaik perusahaan untuk memotivasi karyawannya?”, kemudian tahun 1930-an ia bekerjasama dengan ahli statistik Walter A. Schewhart mengembangkan teknik kontrol statistik yang diterapkan dalam proses manajemen. Kemudian pada akhir perang dunia kedua ia mendirikan perusahaan konsultan. Deaprtemen luar negeri sebagai salah satu klien pertamanya, pada tahun 1942 mengirimnya ke Jepang untuk mempersiapkan sensus nasional di Jepang. Sepeninggal Deming, para manajer perusahaan Amerika mulai melupakan ajaran kontrol mutu yang diajarkan Deming dan kembali pada manajemen tradisional dan bersamaan itu Deming dipuja-puja orang Jepang. Keberhasilan ekonomi mereka selalu dikaitkan dengan metodologi mutu Dr. Deming.

Filosofi Dr. Deming cenderung menempatkan mutu dalam pengertian yang manusiawi. Definisi mutu deming mengacu pada sebuah derajat variasi yang terduga standar yang digunakan dan memiliki kebergantungan pada biaya yang rendah²¹. Inti dari metodologi pendekatan manajemen mutu deming adalah menggunakan teknik statistik sederhana pada *output* program perbaikan yang berkelanjutan. Baginya hanya melalui verifikasi statistik, seorang manajer mengetahui bahwa dia menghadapi masalah dan mampu mencari akar permasalahannya.

Gerakan mutu dalam dunia pendidikan masih tergolong baru. Hanya ada sedikit literatur yang memuat referensi tentang hal ini sebelum tahun 1980-an. Inggris dan Amerika baru pada awal 1990-an dilanda gelombang metode tersebut, yang kemudian menjadikan peningkatan mutu pendidikan sebagai hal yang urgen bagi sebuah intitusi agar diperoleh kontrol serta akuntabilitas yang lebih baik²².

Memahami Konsep Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia, sangat penting artinya bagi proses pembangunan nasional bangsa Indonesia. Wajar pula untuk dikatakan bahwa masa depan suatu bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas saat ini. Pendidikan dengan kaulitas bagus hanya akan muncul apabila ada lembaga pendidikan yang juga berkualitas. Dari sini kemudian dapat

²⁰ Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yosol Iriantara (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 6

²¹*ibid.*, hal. 7

²²Edward Sallis, *Total Quality...*, hal. 43-45

dimaklumi bahwa peningkatan mutu lembaga pendidikan merupakan titik strategis dalam rangka penciptaan pendidikan yang berkualitas²³.

Perhatian terhadap mutu pendidikan secara umum dan pendidikan Islam khususnya merupakan sebuah keniscayaan sejalan dengan pesatnya perkembangan IPTEK, tuntutan masyarakat, jaman yang semakin mengglobal, serta kemajuan pembangunan. Mutu pendidikan merupakan salah satu faktor penentu daya saing bangsa, sehingga untuk dapat tetap eksis dalam percaturan global, pendidikan harus bermutu. Mutu di sini menyangkut mutu dalam proses pendidikannya serta mutu lulusannya.

Mutu mempunyai pengertian yang sangat variatif. Seperti yang dikatakan Nomi Peffer dan Anna Coote bahwa mutu merupakan konsep yang licin²⁴. Mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan²⁵. Sementara itu menurut B. Suryobroto, konsep "mutu" mengandung pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*²⁶. Pada awalnya, konsep mutu banyak dipakai di lingkungan pabrik penghasil barang-barang nyata yang relatif mudah diukur "baik" atau "kurang baik" nya.

Kembali kepada masalah pendidikan, konsep mutu dengan rumusan yang jelas serta konkrit menjadi sebuah keharusan dalam penyelenggaraan pendidikan, walaupun diakui beberapa pakar pendidikan bahwa pembahasan tentang mutu dalam konteks pendidikan sulit didefinisikan dan difahami. Namun demikian, B. Suryobroto memberikan batasan pengertian mutu dalam konteks pendidikan yang mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan²⁷.

Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti: bahan ajar (baik itu bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik), metode (bervariasi sesuai tingkat penguasaan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah serta dukungan kelas berfungsi mensinkronkan/ mensinergikan berbagai input/ komponen dalam interaksi belajar mengajar antara guru dan peserta didik serta sarana lainnya dalam berbagai suasana. Sedangkan mutu dalam

²³Direktorat Dikmenum, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), hal. 177

²⁴Edward Sallis, *Total Quality...*, hal. 50

²⁵Jerome S. Arcaro, *Pendidikan...*, hal. 75

²⁶B. Suryobroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 210

²⁷*Ibid.*, hal. 210

konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai lembaga pendidikan pada kurun waktu tertentu²⁸.

Interpretasi yang lebih jelas dan operasional tentang mutu pendidikan, disampaikan oleh Depdiknas sebagai “*the capacity of school as an institution to provide and utilize educational resources effectively so as to improve learning capacity*”²⁹. Maksud dari pengertian ini diarahkan pada mutu lembaga pendidikan sebagai suatu institusi yang harus memberikan dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan pembelajaran. Sumber-sumber dimaksud adalah komponen input, proses pendidikan, komponen siswa, dan komponen hasil belajar (*learning outcomes*). Sejalan dengan rumusan mutu pendidikan di atas, Abdul Rachman Shaleh mengkategorikan sumber-sumber pendidikan dengan elemen-elemen sekolah efektif yang terdiri dari input, proses, dan output³⁰.

Dalam salah satu karyanya, *Quality is Free*, Philip Crosby³¹ menguraikan pendapatnya bahwa beberapa langkah yang sistematis untuk meningkatkan mutu akan menghasilkan mutu yang baik pula. Beberapa langkah tersebut adalah: (a) komitmen manajemen (*management commitment*); (b) membangun tim peningkatan mutu (*qualityimprovement team*); (c) pengukuran mutu (*quality measurement*); (d) mengukur biaya mutu (*the cost of quality*); (e) membangun kesadaran mutu (*quality awareness*); (f) kegiatan perbaikan (*corrective actions*); (g) perencanaan tanpa cacat (*zero defects planning*); (h) pelatihan pengawas (*supervisor training*); (i) menyelenggarakan hari tanpa cacat (*zero defect day*); (j) penyusunan tujuan (*goal setting*); (k) penghapusan sebab kesalahan (*error-cause removal*); (l) pengakuan (*recognition*); (m) mendirikan dewan-dewan mutu (*quality councils*); (n) lakukan lagi (*do it over again*). Program mutu merupakan proses yang tidak pernah berakhir, sehingga saat program telah tercapai, maka program tersebut harus dimulai lagi.³²

Terkait dengan komponen yang perlu ditingkatkan mutunya, Direktorat Pendidikan Menengah Umum merumuskan beberapa

²⁸Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, 1999, Dikmenum Depdikbud, <http://www.ssep.net.html>

²⁹Ministry of National Education, *Quality Improvement*, Website: <http://www.pdd.go.id/ministrey>

³⁰Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 246

³¹Nama Philip Crosby diasosiasikan dengan dua ide yang sangat menarik dan sangat kuat dalam mutu. Pertama adalah ide bahwa mutu itu gratis, terlalu banyak pemborosan dalam sistem saat mengupayakan peningkatan mutu. Dan yang kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, penundaan waktu bisa dihilangkan jika sebuah institusi mempunyai kemauan untuk itu. Dan dalam perkembangannya, kedua ide tersebut sangat menarik diterapkan dalam dunia pendidikan.

³²Edward Sallis, *Total Quality Management...*, hal. 113-118

komponen pendidikan tersebut yaitu : *pertama*, siswa. Komponen siswa, yang perlu ditingkatkan antara lain adalah kesiapan serta motivasi belajarnya. Terkait dengan motivasi belajar siswa, kepala sekolah sebagai manajer perlu melakukan beberapa hal antara lain: (1) melalui keteladanan Kepala sekolah; (2) menentukan target bersama; (3) mendorong guru menggunakan berbagai model pembelajaran yang inovatif; (4) meyakinkan guru bahwa motivasi sangat menentukan keberhasilan belajar siswa; (5) memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi dan saling bekerja sama; dan (6) mengusahakan tersedianya sarana prasarana penunjang yang kondusif.³³

Selain itu pendidikan Islam tidaklah hanya untuk mewariskan paham atau pola keagamaan hasil internalisasi generasi tertentu kepada anak didik, serta tidaklah memperlakukan anak didik sebagai konsumen dari sebuah paham atau gugusan ilmu tertentu. Sehingga dalam hal ini pendidikan Islam menghantarkan siswa menjadi produsen ilmu dan membentuk pemahaman agama dalam dirinya yang kondusif dengan jaman³⁴.

Kedua, guru. Peningkatan mutu pendidikan terkait dengan komponen guru dalam hal ini adalah bagaimana seorang guru dituntut mempunyai kemampuan profesional, moral kerja yang baik (kemampuan personal), dan mampu bekerja sama dengan baik (kemampuan sosial).

Sehubungan dengan kemampuan profesional para guru, Depdikbud sebagaimana dikutip Nana Syaodih Sukmadinata, merinci 10 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: 1) penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya; 2) pengelolaan program belajar mengajar; 3) pengelolaan kelas, 4) penggunaan media dan sumber pelajaran, 5) penguasaan landasan-landasan kependidikan, 6) pengelolaan interaksi belajar mengajar, 7) peilaian prestasi siswa, 8) pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, 9) pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah, dan 10) pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.³⁵

Berkenaan dengan profesi guru, Al ghazali berpandangan "idealistik". Bagi Al Ghazali, idealisasi seorang guru adalah orang yang berilmu, beramal dan mengajar³⁶. Dari perspektif idealistik ini dapat dimengerti bahwa orang yang mengajar yaitu mereka yang "bergelut" dengan sesuatu yang amat *urgen*, sehingga ia perlu menjaga etika serta kode etik profesinya. Lebih jauh, Muhammad Jawwad Ridla memaparkan

³³Direktorat Dikmenum, *Panduan....*, hal. 127-128

³⁴Abuddin Nata, *Manajemen....*, hal. 167

³⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 193

³⁶Muhammad Jawwad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 129

kode etik yang harus dipatuhi seorang guru yaitu : (a) menyayangi para peserta didiknya; (b) bersedia sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Rasulullah SAW; (3) tidak boleh mengabaikan tugas memberi nasihat kepada para peserta didiknya; (4) mencegah peserta didik jatuh terjerembab ke dalam akhlak tercela melalui cara sepersuasif mungkin dan melalui cara penuh kasih sayang; (5) kepakaran guru dalam spesialisasi ilmu tertentu tidak menyebabkannya memandang disiplin ilmu lainnya; (6) guru menyampaikan materi sesuai tingkat pemahaman peserta didik; (7) terhadap peserta didik yang berkemampuan rendah, guru harus menyampaikan materi dengan jelas, kongkrit; dan (8) guru mau mengamalkan ilmunya, sehingga yang ada adalah menyatunya ucapan dan tindakan³⁷.

Ketiga, kurikulum. Kurikulum merupakan unsur lain yang tak kalah penting, karena kurikulum pada dasarnya merupakan manifestasi tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai sebuah institusi pendidikan³⁸. Kurikulum yang dalam pembahasan ini dimaknai sebagai bahan pengajaran dimana isinya harus mempunyai relevansi dengan operasionalisasi proses pembelajarannya³⁹. Artinya bahwa bahan pengajaran hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik di sekitarnya, agar anak didik tidak memperoleh bentuk pemahaman yang bersifat parsial dan segmentatif⁴⁰.

Keempat, Dana, sarana dan prasarana. Peningkatan mutu komponen ini mengandung pengertian bahwa bagaimana pembiayaan (dana), sarana dan prasarana pendidikan memenuhi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan⁴¹.

Kelima, Masyarakat. Masyarakat dalam pembahasan ini adalah orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi. Peningkatan mutu komponen ini ditandai dengan adanya partisipasi mereka dalam mengembangkan program pendidikan di sebuah lembaga pendidikan.

Adapun penyusunan program peningkatan mutu lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan mengaplikasikan empat teknik yaitu : (a) *school review*, (b) *benchmarking*, (c) *quality assurance*, dan (d) *quality*

³⁷*Ibid.*, hal. 129-132

³⁸Munir, "Eksistensi dan Degradasi Lembaga Pendidikan Islam", dalam Toto Suharto et. Al. (eds.), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005) hal. 96

³⁹Direktorat Dikmenum, *Panduan...*, hal. 169

⁴⁰Abuddin Nata, *Manajemen...*, hal. 168

⁴¹Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 2

control. Keempat teknik tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama, school review*. *School review* merupakan suatu proses dimana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga ahli (profesional) untuk mengevaluasi dan menilai efektifitas sekolah serta mutu lulusan. Teknik ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai : kesesuaian hasil yang dicapai sekolah dengan harapan orang tua siswa dan siswa sendiri, prestasi belajar siswa, faktor yang menghambat upaya peningkatan kualitas peserta didik, faktor pendukung dalam rangka meningkatkan mutu yang dimiliki sekolah.

Kedua, Benchmarking. *Benchmarking* merupakan proses terstruktur untuk memperoleh perspektif baru kebutuhan pengguna jasa⁴². *Benchmarking* dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok ataupun lembaga. Sementara itu Balitbang depdiknas memberikan rumusan mengenai benchmarking sebagai suatu penilaian terhadap proses dan hasil untuk menuju kepada suatu keunggulan yang memuaskan⁴³, keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menyamai atau bahkan melebihi praktek-praktek terbaik, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Ketiga, Quality Assurance. *Quality assurance* merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan teknik ini akan bisa dideteksi berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses. Sehingga untuk menghindari penyimpangan, dengan teknik ini kepala sekolah perlu melakukan supervisi dan monitoring secara berkesinambungan terhadap kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan⁴⁴. Dengan teknik ini akan menghasilkan informasi sebagai umpan balik bagi sekolah, memberikan jaminan bagi orang tua siswa bahwa sekolah memberikan pelayanan terbaik bagi siswa.

Keempat, Quality control. Teknik ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas out put yang tidak sesuai dengan standar. *Quality control* memerlukan sebuah indikator kualitas yang jelas dan pasti, sehingga dapat ditentukan secara jelas penyimpangan kualitas yang terjadi.

Uraian tentang mutu pendidikan di atas memberikan wawasan pemahaman bahwa tanggung jawab peningkatan kualitas pendidikan secara mikro mengalami pergeseran dari birokrasi pusat menuju unit pengelola yang lebih dasar yakni lembaga pendidikan. Dengan kata lain, di dalam masyarakat yang kompleks di mana inovasi yang telah membawa pada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, sehingga diyakini bahwa peran

⁴² Jerome S. Arcaro, *Pendidikan...*, hal. 206

⁴³ Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, *Dokumen Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah*, (www.puskur.co.id., diakses bulan Maret 2003

⁴⁴ Depdiknas, *Manajemen...*, alh. 45

pemerintah pusat tidak lagi secara tepat dan cepat bisa merespon perubahan keinginan masyarakat.

Kondisi yang demikian membawa kepada sebuah kesadaran bahwa hanya lembaga pendidikan yang dikelola secara efektiflah yang akan mampu menjawab tantangan jaman serta merespons aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan.

Pesantren sebagai Model Pendidikan yang Berakar dari Masyarakat

Dalam gambaran secara utuh, dunia pesantren memperlihatkan dirinya sebagai sebuah parameter, suatu faktor yang secara tebal turut mewarnai corak kehidupan masyarakat luas, tetapi dirinya sendiri tak kunjung berubah, ibarat tak pernah bersentuhan dengan kehidupan masyarakat di sekelilingnya⁴⁵. Kalaupun orang membayangkan perubahan pada institusi pesantren, maka perubahan itu akan memerlukan rentang waktu yang sangat panjang. Namun yang jelas bahwa masyarakat secara umum memandang pesantren sebagai sosok pribadi yang sukar diajak berbicara mengenai perubahan, sulit dipahami pandangan-pandangannya sehingga orang pun enggan membicarakannya.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, karena dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan dan tuntutan dinamika masyarakat, banyak pondok pesantren mulai membuka diri, berbenah dalam segala aspek kehidupannya dengan berbagai aktifitas yang bertujuan memberdayakan potensi masyarakat sekitarnya. Hal ini merupakan suatu keharusan karena keberadaan pondok pesantren dan masyarakat merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling mempengaruhi.

Berdasarkan kondisi pesantren yang sedemikian rupa, maka konsep pesantren menurut Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Bahri Ghazali, menjadi cerminan pemikiran masyarakat dalam mendidik dan melakukan perubahan sosial terhadap masyarakat. Dampak yang jelas adalah terjadi perubahan sosial terhadap masyarakat⁴⁶, meskipun realitasnya sedikit sekali pemimpin-pemimpin pesantren yang menyadari potensi positif pesantren tersebut⁴⁷.

Sejarah Pesantren

Berpijak pada pengertian yang secara implisit terkandung dalam pasal 26 ayat 1 s.d. 7, Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem

⁴⁵M. Dawam Rahardjo, "Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan", dalam Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. Ke-5, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 1

⁴⁶M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Prasasti, 2003), hal. 13

⁴⁷M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 2003), hal. 101

pendidikan nasional, pesantren merupakan salah satu model pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini dikarenakan kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah “untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim”⁴⁸ dengan mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara baik.

Secara terminologi menurut Achmad Djajadiningrat sebagaimana dikutip Karel A. Steenbrink dapat dijelaskan bahwa pendidikan pesantren, dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pendidikan agama Hindu di Jawa⁴⁹. Setelah Islam masuk dan tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil alih oleh Islam.

Menurut Mujamil Qomar, sebagai institusi pendidikan Islam yang dinilai paling tua, pesantren memiliki akar transmisi sejarah yang jelas. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, orang yang pertama mendirikan pesantren dapat dilacak. Di kalangan sejarawan terdapat perselisihan pendapat dalam menyebutkan pendiri pesantren pertama kali. Sebagian menyebut Maulana Malik Ibrahim sebagai pendiri pesantren pertama di Jawa, ada pula yang menganggap Sunan Ampel dan bahkan Sunan Gunung Jati sebagai pendiri pesantren pertama kali⁵⁰.

Perkataan “pesantren” sendiri berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe- di depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri.⁵¹ Ahmad Qodri A. Azizy memberikan definisi pesantren sebagai “tempat tinggal para santri yang belajar atau semacam asrama, dan di situ ada seorang (beberapa orang) kiai sehingga figur pimpinannya dan tempat ibadahnya sekaligus sebagai tempat belajarnya, seperti musholla atau masjid”.⁵² Sejalan dengan itu, Mastuhu memberikan rumusan tentang pengertian pesantren sebagai “lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”.⁵³

Sejalan dengan terminologi yang diberikan para tokoh di atas, Deliar Noer memberikan definisi yang sederhana tentang pesantren atau surau (sebutan untuk daerah Sumatera) sebagai lembaga pendidikan Islam

⁴⁸Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hal. 55

⁴⁹Karela A Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Cetakan ke-2, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 20

⁵⁰Mujamil Qomar, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 7-8

⁵¹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Suti tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 18

⁵²Ahmad Qodri A. Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), hal. 102

⁵³Mastuhu, *Dinamika ...*, hal. 55

tradisional yang didirikan atau dimiliki oleh guru yang disebut kyai atau syaikh⁵⁴. Kemudian Abdurrahman Wahid memberikan definisi tentang pesantren sebagai sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari lingkungan sekitarnya, terdiri dari rumah pengasuh [dalam bahasa Jawa disebut *kyai*, bahasa Sunda *ajengan*, dan Madura *bendara* (disingkat *ra*)], surau atau masjid, tempat belajar, dan asrama santri⁵⁵.

Beberapa definisi tentang pesantren tersebut, tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Ini dikarenakan adanya sebuah perbedaan dasar sebagai pijakan dalam pengidentifikasian pesantren. Walaupun demikian, semua definisi tersebut adalah benar dan pada intinya adalah sama yaitu tidak lepas dari lima elemen dasar sebuah pesantren yaitu: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan kyai.⁵⁶

Jadi di sini dapat diambil sebuah rumusan bahwa pesantren adalah suatu komunitas atau sub unit masyarakat yang terdiri atas kyai sebagai pengasuh, guru-guru sebagai pengajar, santri sebagai peserta didik, dalam lingkungan yang berupa pondok / asrama, masjid sebagai pusat lembaganya atau ruang lain sebagai tempat pendidikan guna memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam.

Secara historis, pesantren merupakan salah satu bagian penting dari keseluruhan sistem pendidikan Islam di Indonesia⁵⁷. Selain itu pesantren juga telah mendokumentasikan berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi, maupun politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam, pesantren adalah saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia, karena pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan Islamisasi di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam nusantara, khususnya Jawa, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan penyebaran agama Islam, lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan di Indonesia. Lembaga seperti pesantren ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam itu sendiri⁵⁸ di Indonesia. Lembaga pendidikan berasrama merupakan lembaga tempat mendalami agama Hindu dan Budha. Namun bedanya, pada lembaga ini hanya diperuntukkan untuk kaum aristokrat, sedangkan pesantren didatangi dan diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat.

⁵⁴Deliar Noer, *Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), hal. 302

⁵⁵Abdurrahman Wahid, "Pesantren sebagai Subkultur", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan...*, hal. 40

⁵⁶Zamakhshyari Dhofier, *Tradisi...*, hal. 44

⁵⁷Imam Bawani, *Segi-Segi Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), hal. 83

⁵⁸Suyoto, "Pesantren dalam Pendidikan Nasional", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), *Pesantren dan...*, hal. 65

Dalam dunia Islam sendiri, model pendidikan seperti pesantren sebenarnya sudah ada pada abad-abad awal Islam, yang mana model pendidikan seperti pesantren ini merupakan pusat kegiatan kaum sufi yang pada masa itu disebut dengan *khanaqah* atau *zawiya*. Sementara itu orang Turki menyebutnya dengan *tekke*. Di Afrika utara, tempat seperti itu disebut *ribat*, sedangkan di India disebut dengan jama'ah *khana* atau *khanegah*⁵⁹. Trimingham menyebutkan bahwa *ribat* adalah pusat latihan yang berasal dari daerah Arab. Sedangkan di Khurasan disebut *khanaqah*⁶⁰, yang pada mulanya digunakan sebagai benteng pertahanan terhadap serangan musuh.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah *ribat* lebih banyak digunakan sama dengan pengertian *zawiya* atau *khanaqah*. *Ribat* tidak banyak digunakan sebagai latihan militer, tetapi lebih banyak diarahkan kepada tempat pendidikan bagi calon sufi. Sejak abad ke-11 Masehi, *zawiya-zawiya* dan *khanaqah-khanaqah* yang menyediakan tempat persitirahatan sementara bagi sufi yang berkelana telah menyebarkan serta memainkan peranan menentukan dalam pengislaman daerah perbatasan dan wilayah-wilayah non Arab di Asia Tengah dan Afrika Utara.

Dari sini dapat difahami bahwa akar geneologi munculnya pesantren sebenarnya dapat ditarik dari sejarah dunia Islam sendiri, meskipun model-model pesantren juga dekat dengan model pendidikan *mandhala* di agama Budha dan *cantrik* di agama Hindu.

Sejarah lahir dan berkembangnya pesantren di Indonesia tidak lepas dari perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian pondok pesantren mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, banyak didirikan masjid dan pondok pesantren di seluruh nusantara, bahkan para pemimpin memelopori usaha-usaha untuk memajukan dunia pendidikan dan pengajaran Islam dalam pesantren.

Pada permulaan berdirinya, bentuk pesantren sangat sederhana⁶¹. Kegiatannya hanya diselenggarakan dalam masjid dengan beberapa santri. Kedudukan dan fungsi pesantren saat itu belum sebesar dan sekompleks sekarang. Pada masa awal, pesantren hanya berfungsi sebagai alat Islamisasi dan sekaligus memadukan tiga unsur pendidikan yakni: ibadah untuk menanamkan iman, tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan

⁵⁹Fadhalla Haeri, *Jenjang-Jenjang Sufisme*, Ibnu Burdah dan Shohifullah (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 38

⁶⁰J. Spencer Trimingham, *The Sufi Orders in Islam*, (London: Oxford University Press, 1971), hal. 5

⁶¹Kesederhanaan pesantren ini terlihat dari kurang terorganisir pesantren secara baik; mulanya tidak ada kelas, tidak ada ujian, malah tidak ada rencana kurikulum. Belajar lebih bersifat menghafal, membaca pun senantiasa dipimpin oleh guru. Kemajuan murid sangat lambat sehingga seseorang harus menghabiskan 10-15 tahun dalam pesantren untuk dapat akhirnya bertindak sebagai asisten atau pembantu guru.

amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari.⁶² Akan tetapi setelah datangnya kaum penjajah ke Indonesia, pesantren bukan saja sebagai pusat untuk mempelajari ajaran agama Islam, namun sekaligus merupakan benteng terhadap usaha sekularisasi yang dilakukan penguasa⁶³. Pesantren sebagai pusat latihan dan pusat penggemblengan mental untuk melawan penjajah. Penjajah bukanlah sekedar musuh kemerdekaan dan merampas tanah air masyarakat Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan musuh agama dan martabat mereka.

Dengan latar belakang sejarah pertumbuhan pesantren, telah membuktikan bahwa pesantren mencerminkan pendidikan tradisional bangsa Indonesia. Mulai jaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan, pesantren dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perkembangan tersebut merupakan kondisi yang baik. “Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat”.⁶⁴ Walaupun dalam hal ini dipandang dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, pesantren ikut menyesuaikan diri dengan adanya pesantren modern dengan menyelenggarakan pendidikan formal dalam bentuk madrasah atau sekolah umum maupun kejuruan dengan harapan lulusan pesantren akan memiliki pengetahuan akademis dan ketrampilan praktis yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Uraian di atas mungkin sekaligus menjawab sebuah tanda tanya besar “Mengapa pesantren tetap *survive* hingga saat ini?”. Secara implisit pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa ada tradisi lama yang hidup di masyarakat yang pada taraf-teraf tertentu dianggap masih relevan. Selain itu, masih eksisnya pesantren dikarenakan ia tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi karakter eksistensialnya mengandung arti keaslian (*indigenous*).

Pada umumnya, lingkungan pesantren terdiri dari rumah kyai, sebuah langgar/masjid yang selain berfungsi sebagai tempat peribadatan, juga sebagai tempat pendidikan, sebuah atau lebih pondokan yang diperuntukkan bagi para santri, sebuah atau lebih ruangan untuk memasak dan kolam atau ruangan untuk mandi atau berwudlu⁶⁵. Sementara itu Zamakhsyari Dhofier mengidentifikasi unsur dasar yang

⁶²Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 71

⁶³Deliar Noer, *Islam...*, hal. 303

⁶⁴Nurcholis Madjid, *Bilik – Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 87-88

⁶⁵Karel A. Stennbrink, *Pesantren...*, hal. 16-17

membentuk lembaga pesantren yaitu: kyai, masjid, asrama dan kitab kuning⁶⁶.

Pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu *pertama* pesantren *salafi* yang tetap mempertahankan pengajaran kitab klasik sebagai inti pendidikan pesantren. Sistem madrasah diterapkan untuk memudahkan sistem *sorogan* dengan tidak memperkenalkan pengetahuan umum. *Kedua*, pesantren *khalafi* yang telah memasukkan pengetahuan umum dalam sistem pendidikannya atau paling tidak membuka sekolah umum di lingkungan pesantren⁶⁷.

Sementara itu menurut Hamdan Farchan dan Syarifuddin⁶⁸, pesantren saat ini bisa diklasifikasi menjadi tiga kategori: *pertama*, pesantren modern yang mempunyai ciri-ciri; (1) memiliki manajemen dan administrasi dengan standar modern; (2) tidak terikat pada figur kyai sebagai tokoh sentral; (3) pola dan sistem pendidikan yang dijalankan menganut sistem modern dengan kurikulum yang tidak hanya ilmu agama tetapi juga pengetahuan umum; dan (4) sarana dan bentuk bangunan lebih mapan dan teratur, permanen, dan berpagar. *Kedua*, pesantren tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut; (1) tidak memiliki manajemen dan administrasi modern, sistem pengelolaan pesantren terpusat oleh aturan kyai yang kemudian diterjemahkan oleh para pengurus pondok; (2) terikat kuat pada kyai sebagai tokoh sentral; (3) pola dan sistem pendidikan bersifat konvensional dan pengajarannya bersifat satu arah; dan (4) bangunan asrama santri tidak tertata rapi, pondok pesantren menyatu dengan masyarakat. *Ketiga*, pesantren semi modern yang merupakan paduan antara tradisional dan modern. Pada pesantren jenis ini nilai-nilai tradisional masih kental dipegang, tetapi juga mengadaptasi sistem pendidikan modern dan sarana fisik pesantren.

Sedangkan menurut M. Ridwan Nasir, ada lima klasifikasi pesantren yaitu: *Pertama*, pesantren *salaf* (tradisional); *kedua*, pesantren semi berkembang; *ketiga*, pesantren berkembang; *keempat*, pesantren *khalaf* (modern); dan *kelima*, pesantren ideal⁶⁹.

Kini di tengah-tengah sistem pendidikan nasional yang selalu berubah-ubah dalam jeda waktu yang tidak begitu lama, pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang paling lama andil dalam membangun kecerdasan masyarakat, dituntut berupaya menjawab tantangan serta perubahan di masyarakat. Perubahan yang terjadi di

⁶⁶Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, hal. 44-60

⁶⁷*Ibid.*, hal. 41

⁶⁸Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 1-2

⁶⁹M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 87-88

masyarakat sebagai gejala faktual menjadi obyek penyerapan bagi pesantren dalam menentukan langkah politik pendidikannya⁷⁰.

Basis Kultural Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia. Eksistensi lembaga pendidikan ini agaknya menjadi sebuah isyarat bahwa ternyata dalam beberapa hal Islam tradisional masih tetap relevan ditengah arus modernisasi yang semakin besar. Namun juga perlu diingat walaupun pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tertua, pesantren dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian telah mengalami kesurutan sejarah karena berbagai persoalan yang menyimpannya. Diantara persoalan tersebut adalah permasalahan suksesi, regenerasi penerus sang kyai, dan sebagainya, sehingga saat ini kemampuan yang kuat dari pesantren untuk mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pendidikannya merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikarenakan adanya potensi yang dimiliki pondok pesantren serta sedemikian derasnya arus terhadap pesantren yang menantanginya untuk menjawab problem-problem pendidikan di masyarakat.

Dengan demikian, sesungguhnya pesantren terbangun dari sebuah konstruk kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai *centre of knowledge* dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosa yang berakar pada konstruk epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Eksistensi pesantren hingga saat ini juga dikarenakan semangat kesederhanaan yang ditawarkan oleh pesantren serta daya rekat yang tinggi terkait dengan konsepsi perilaku (*social behavior*) yang ditawarkan oleh pesantren yang sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya.

Ada tiga karakteristik yang menjadi basis utama kultur pesantren. *Pertama*, tradisionalisme. Tradisionalisme dalam konteks pesantren dipahami sebagai sebuah upaya meneladani para ulama salaf yang relatif masih murni dalam menjalankan ajaran Islam. Kemudian hal ini dikenal dengan “gerakan salaf” yakni gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali kepada rel ulama *salaf*⁷¹. *Kedua*, pertahanan budaya (*cultural resistance*). Pesantren sebagai pertahanan budaya artinya bahwa mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran Islam merupakan budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Dengan semangat ini, pesantren telah teruji ketegarannya dalam menghadapi berbagai hegemoni dari luar. Sejarah mencatat ketika penjajah semakin menindas rakyat Indonesia, saat itu pula perjuangan kaum pesantren semakin gigih.

⁷⁰Achmad Patoni, “Modernisasi Pendidikan di Pesantren”, dalam Akhyak (ed.), *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 345

⁷¹Karel A. Steenbrink, *Pesantren...*, hal. 29

Ketiga, pendidikan keagamaan. Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan didasari, digerakkan dan diarahkan oleh nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Ajaran dasar ini bersentuhan dengan dinamika kehidupan sosial umat Islam. Dengan demikian, pendidikan pesantren didasarkan atas dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas kehidupan sosial yang punya nilai kebenaran relatif⁷².

Pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren adalah pendidikan sepanjang waktu dengan kyai sebagai tokoh sentral. Model pendidikannya tidak terikat dengan aturan formal seperti kurikulum, guru maupun waktu belajar mengajar. Kebebasan sesuai dengan kebutuhan para santri, sehingga pondok pesantren selain memiliki kekuasaan juga punya kebebasan untuk menentukan tujuan dan sikap.

Menurut Imron Arifin⁷³, karakteristik pesantren secara umum adalah : (1) pondok pesantren tidak menggunakan batasan umur bagi para santri; (2) tidak menetapkan batas waktu pendidikan, karena sistem pendidikan di pesantren bersifat pendidikan seumur hidup; (3) siswa dalam pesantren tidak diklasifikasikan dalam jenjang menurut kelompok usia, sehingga masyarakat yang ingin belajar bisa menjadi santri atau siswa; (4) santri boleh bermukim di pesantren sampai kapan pun atau bermukim di situ selamanya, dan jika dikehendaki bisa dipindah untuk mencari guru ke tempat lain atau pulang ke tempat asal bila telah cukup dan mampu mengembangkan diri sendiri; dan (5) pesantren tidak mempunyai aturan administrasi (tata usaha) yang tetap dimana seseorang dapat bermukim di sana tanpa mengaji jika ia mau, asal ia mencari nafkah sendiri dan tidak menimbulkan masalah dari tingkah lakunya.

Upaya Peningkatan Mutu Pondok Pesantren *Salafiyah*

Pondok pesantren selama ini telah menunjukkan kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatannya sendiri dengan memobilisasi sumber daya yang tersedia di masyarakat yang menjadi pendukungnya. Secara historis ia telah dipercaya sebagian besar masyarakat santri sebagai lembaga pemberdayaan diri dan penyadaran.

Dari pengamatan berbagai pakar, terlihat bahwa kemandirian yang dijalankan dunia pesantren sampai saat ini belum dimaksimalkan terutama untuk melakukan terobosan-terobosan yang berarti dalam upaya meningkatkan mutu lembaga pendidikannya. Bahkan tidak sedikit pesantren yang terkesan lamban dalam merespon tuntutan perubahan masyarakat.

⁷²Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), hal. 26

⁷³Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, (Malang: Kalimashada Press, 1992), hal. 5

Beberapa hal yang kemudian menjadi titik lemah pondok pesantren menurut analisis Kementerian Agama adalah: manajemen pengelolaan pondok pesantren, kaderisasi pondok pesantren, budaya demokratis dan disiplin, serta kebersihan di lingkungan pondok pesantren⁷⁴.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpotensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitarnya, termasuk upaya transformasi sosial yang akan dilakukan oleh pondok pesantren⁷⁵. Upaya yang demikian, sebaiknya ditempuh melalui pendayagunaan modal dan potensi kultural yang telah dimiliki oleh pondok pesantren, dengan tidak menafikan kaidah *al muh}a>faz}ah ‘ala al-qadi>m al-s}a>lih} wa al-akhdz\ bi al-jadi>d al-aslah}*.

Oleh karenanya pesantren harus merespon situasi dan kondisi masyarakat secara seimbang, serta membuka diri dalam merespon perubahan dengan meningkatkan manajemen pengelolaannya, walaupun perubahan itu sedikit banyak akan mengurangi nilai-nilai kharismatik, kewibawaan atau barangkali keikhlasan. Pesantren harus bersikap adaptif dan adoptif terhadap sistem baru seperti madrasah atau sekolah, demikian pula bersedia untuk selalu menyempurnakan kurikulum yang dipakai yang disesuaikan dengan tuntutan jaman, serta menyesuaikan pola kepemimpinan pesantren yang lebih demokratis.

Selain itu untuk menghadapi tantangan globalisasi yang semakin pesat, pesantren harus menggali dan kemudian menerapkan strategi-strategi yang dapat dikembangkan untuk peningkatan mutu lembaga pendidikannya, baik dari segi proses maupun out putnya. Dengan pengelolaan yang baik, stigma yang sampai saat ini masih menempel pada pesantren, seperti lingkungan pendidikan yang kumuh akan bisa dihapus atau paling tidak dikurangi.

Tetapi karena pesantren merupakan jenis pendidikan yang berakar dari masyarakat, maka penerapan strategi atau upaya yang diambil dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pesantren juga perlu memperhatikan komponen-komponen dalam pendidikan berbasis masyarakat. Strategi atau upaya yang mungkin bisa dilakukan antara lain dengan mengupayakan semua sumber daya yang dimiliki pesantren yang mempunyai daya dukung tinggi terhadap peningkatan mutu pendidikannya. Sehingga kemudian pesantren benar-benar menjadi institusi yang cepat tanggap dalam merespons setiap persoalan yang muncul di masyarakat melalui strategi yang dimilikinya.

Penutup

Pesantren bukan semata-mata merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan, mengembangkan serta menyebarkan ilmu agama Islam

⁷⁴Tim Penyusun, *Pola Pengembangan ...*, hal. 36-38

⁷⁵*ibid.*, hal. 26

semata. Melainkan juga sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai nilai-nilai tersendiri yang memiliki fungsi amal terhadap masyarakat serta hubungan tata nilai dengan kultur masyarakat, khususnya yang ada dalam lingkungan pengaruhnya.

Dari sini nampak sekali bahwa pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, bertanggung jawab untuk membimbing dan mengembangkan tingkah laku anak didik sesuai dengan tuntunan *Ilahi*, yang pada akhirnya akan menemukan sebuah makna hidup yang sesungguhnya. Dengan demikian, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses dari segala lapisan sosial terhadap pendidikan, peran pesantren tidak hanya perlu ditegaskan, tetapi mendesak untuk dilibatkan secara langsung.

Tuntutan masyarakat dan tantangan global harus direspon oleh komponen pondok pesantren, sehingga dapat tetap *survive* dalam perubahan jaman yang sedemikian cepat dan pesat. Pesantren harus melakukan upaya-upaya, langkah-langkah atau strategi yang mampu menjawab tantangan dan perubahan tersebut, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan mutu lembaga pendidikannya. Gerak dan perubahan merupakan hukum yang mutlak. Pesantren sebagai institusi kultural sejak awal telah memiliki kaidah pembaharuan yaitu *al muh}a}faz}ah 'ala al-qadi}m al-s}a}lih} wa al-akhdz\ bi al-jadi}d al-aslah*. Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana melakukan pembaharuan agar tidak latah sekedar mengikuti gaya yang "ngetrend" dan tetap menjaga kondisi keseimbangan antara sisi vertikal dan horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyak (ed.), *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Arcaro, Jerome S., *Pendidikan Berbasis Mutu*, Yosol Iriantara (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Arifin, Imron, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, Malang: Kalimashada Press, 1992
- Azizy, Ahmad Qodri A., *Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari Jalan Keluar*, Yogyakarta: Lkis, 2000
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Bawani, Imam, *Segi-Segi Pendidikan Islam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1987
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES, 1981
- Direktorat Dikmenum, *Panduan Manajemen Sekolah*, Jakarta: Depdiknas, 2000
- Farchan, Hamdan, dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Ghazali, M. Bahri, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Prasasti, 2003
- Haeri, Fadhallah, *Jenjang-Jenjang Sufisme*, Ibnu Burdah dan Shohifullah (terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Hasan, M. Ali, dan Mukti Ali, *Kapita selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Madjid, Nurcholis, *Bilik – Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994
- Mastuki dan Abd. Adhim, *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren*, Jakarta: Dirjend Bagais Depag RI, 2004
- Ministry of National Education, *Quality Improvement*, Website: <http://www.pdd.go.id/ministrey>
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
- Nasir, M. Ridwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Noer, Deliar, *Islam dan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003
- Pemerintah RI, *Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara, 2003

- Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, *Dokumen Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah*, (www.puskur.co.id), diakses bulan Maret 2003
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: dari Transformasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Rahardjo, M. Dawam, (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, cet. Ke-5, Jakarta: LP3ES, 1995
- Ridla, Muhammad Jawwad, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Sallis, Edward, *Total quality Management in Education*, Ahmad Ali Riyadi et.al. (terj.), Jogjakarta: IRCiSoD, 2006
- Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Soetari, Endang, *Pesantren, Solusi Pendidikan Masa Depan*, http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/0902/06/0414.htm, diakses 8 Desember 2005
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren Madrasah Sekolah*, Cetakan ke-2, Jakarta: LP3ES, 1994
- Suharto, Toto, et.al. (eds.), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2005
- Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Suryobroto, B., *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Trimingham, J. Spencer, *The Sufi Orders in Islam*, London: Oxford University Press, 1971
- Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Barau dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, 1999, Dikmenum Depdikbud, <http://www.ssep.net.html>
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: Lkis, 2001
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997